

RISALAH RAPAT DARI PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN, KEPUTUSAN ATAU KEBIJAKAN YANG DIBENTUK;



**RISALAH RAPAT DARI PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN, KEPUTUSAN
ATAU KEBIJAKAN YANG DIBENTUK;**

**PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019 - 2039**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : 1. Sub Koordinator Keterpaduan Infrastruktur;
2. Sub Koordinator Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
3. Sub Koordinator Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
4. Tim Teknis Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tembusan Yth : Sekretaris Dinas

Dari : Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nomor : 06/BidIV/III/2023

Tanggal : 9 Maret 2023

Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan RP3KP Tahun 2019-2039

Menindaklanjuti Berita Acara Nomor 76/KL/HK/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 perihal Desk Penyusunan Peraturan Gubernur sebagai Tindak Lanjut Perda Tahun 2019 s.d. 2022 maka akan diselenggarakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan RP3KP Tahun 2019-2039. Untuk itu, kami memohon kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari, Tanggal : Senin, 13 Maret 2023
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP Lantai 2
Kantor DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**KEPALA BIDANG KETERPADUAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**


ARIF SUGENG HARYANTO, ST

Pembina (IV/a)
NIP. 19731120 200501 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : 1. Sub Koordinator Keterpaduan Infrastruktur;
2. Sub Koordinator Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
3. Sub Koordinator Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman,
dan Pertanahan;
4. Tim Teknis Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tembusan Yth : Sekretaris Dinas

Dari : Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nomor : 04 /BidIV/III/2023

Tanggal : 7 Maret 2023

Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
tentang Petunjuk Pelaksanaan RP3KP Tahun 2019-2039

Menindaklanjuti Berita Acara Nomor 76/KL/HK/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 perihal Desk Penyusunan Peraturan Gubernur sebagai Tindak Lanjut Perda Tahun 2019 s.d. 2022 maka akan diselenggarakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan RP3KP Tahun 2019-2039. Untuk itu, kami memohon kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP Lantai 2
Kantor DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**KEPALA BIDANG KETERPADUAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

ARIF SUGENG HARYANTO, ST,

Pembina (IV/a)

NIP. 19731120 200501 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : 1. Sub Koordinator Keterpaduan Infrastruktur
2. Sub Koordinator PEPP
3. Staf Teknis Keterpaduan

Lewat Yth : -

Dari : Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nomor : 24 / Dd IV / IV / 2023

Tanggal : 6 April 2023

Dalam rangka Rapat Koordinasi P3KP dan Pertanahan , maka akan diselenggarakan **Rapat Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan RP3KP Provinsi Jawa Tengah 2019-2039** , untuk itu kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2023
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Keterpaduan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/ Ibu diucapkan terima kasih.

**KEPALA BIDANG KETERPADUAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

ARIF SUGENG HARYANTO, ST

Pembina

NIP. 19731120 200501 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : 1. Kepala Bidang Perumahan;
2. Kepala Bidang Kawasan;
3. Kepala Bidang Pertanahan;
4. Kepala Bidang Keterpaduan;
5. Kepala Sub Bagian Program.

Tembusan Yth : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Dari : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah

Nomor : 4 /BidIV/V/2023

Tanggal : 5 Mei 2023

Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
tentang Petunjuk Pelaksanaan RP3KP Tahun 2019-2039

Menindaklanjuti Berita Acara Nomor 76/KL/HK/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 perihal Desk Penyusunan Peraturan Gubernur sebagai Tindak Lanjut Perda Tahun 2019 s.d. 2022 maka akan diselenggarakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan RP3KP Tahun 2019-2039. Untuk itu, kami memohon kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari, Tanggal : Senin, 8 Mei 2023
Waktu : 08.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang Keterpaduan PKP Lantai 2
Kantor DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19731113 199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

Nomor : 005 / 1881
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Undangan

Semarang, 19 Mei 2023

Kepada Yth,
- Terlampir -
di
Tempat

Menindaklanjuti Berita Acara Nomor 76/KL/HK/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 perihal Desk Penyusunan Peraturan Gubernur sebagai Tindak Lanjut Perda Tahun 2019 s.d. 2022, bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/ Ibu dalam **Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan RP3KP Tahun 2019-2039** yang akan diselenggarakan secara *hybrid* (daring dan luring) pada :

Hari/tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Jl. Madukoro Blok AA-BB Kota Semarang
Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang
Petunjuk Pelaksanaan RP3KP Tahun 2019-2039
Catatan : Dimohon kepada setiap OPD dapat memberikan masukan sesuai
format terlampir pada link sebagai berikut
[REDACTED] dan dibawa pada saat rapat.
Koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi [REDACTED]
[REDACTED]

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DISPERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
IF ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660801 199603 1 004

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Perekonomian, Setda Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran I

Nomor : 005 / 1881

Tanggal : 19 Mei 2023

Kepada Yth :

A. Instansi Pemerintah

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III (Jateng-DIY);
2. Badan Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah;
3. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas PU SDA dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Permasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro ISDA Setda Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
11. Sekretaris Disperakim Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Bidang Perumahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperakim Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Bidang Pertanahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Bidang Keterpaduan Disperakim Provinsi Jawa Tengah.

B. Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. DPD Jawa Tengah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI);
2. DPW Provinsi Jawa Tengah Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS);
3. DPD REI Jawa Tengah;
4. HIMPERRA DPD Jawa Tengah;
5. Dewan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Provinsi Jawa Tengah;
6. Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Pedesaan Provinsi Jawa Tengah;

C. Asosiasi Profesi Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Ikatan Ahli Perencanaan (IAP);
2. Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI);
3. Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Lingkungan Indonesia (IATPI) Provinsi Jawa Tengah;
4. Ikatan Notaris Indonesia (INI);
5. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa
Yth. Tengah
Melalui : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa
Tengah
Dari : Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tanggal : 20 Januari 2023
Nomor : 028 /BidIV/I/2023
Perihal : Laporan Desk Penyusunan Pergub Sebagai Tindak Lanjut Perda Tahun 2019 s.d 2022

A. UMUM

Menindaklanjuti Surat Undangan Kepala Biro Hukum, Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor : 180.0/64 tanggal 17 Januari 2023 perihal Undangan Desk Penyusunan Pergub Sebagai Tindak Lanjut Perda Tahun 2019 s.d 2022 yang telah dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Pukul : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Gedung A Lantai 5

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Desk ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi terkait progress tindak lanjut penyusunan Peraturan Gubernur sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022.

C. HASIL

- 1) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagai Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 pada Tahun ini harus segera di tindaklanjuti.
- 2) Terdapat materi muatan rancangan Pergub yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2019 tentang RP3KP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut :
 - Pasal 16 ayat (6) ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - Pasal 18 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- 3) Diperlukan pengisian Form pengajuan judul produk hokum maksimal dikumpulkan ke Biro Hukum pada Jumat, 20 Januari 2023.
- 4) Penyusunan Pergub paling lambat bulan Juni 2023 sudah di tandatangani Gubernur.
- 5) Disperakim Prov. Jateng telah menandatangani berita acara pada Desk Penyusunan Pergub pada berita acara Nomor : 76/KL/HK/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 (*terlampir*).
- 6) Berdasarkan dari pelaksanaan desk tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah akan mengusulkan penyusunan Pergub yang telah disusun serta melakukan penyesuaian kembali dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga diperlukan tindak lanjut

pembahasan dengan OPD terkait dalam pembahasan penyusunan draft Rapergub.

Demikian laporan kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Yang melaporkan,
**Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan
dan Kawasan Permukiman**



ARIF SUGENG HARYANTO, ST

NIP. 19731120 200501 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Melalui : Pih. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah 27/ 29/ 23
Dari : Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tanggal : 29 Mei 2023
Nomor : 41/BidW/V/ 2023
Perihal : Laporan Progress Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang
Petunjuk Pelaksanaan RP3KP Tahun 2019-2039

A. UMUM

Menindaklanjuti Menindaklanjuti Berita Acara Nomor 76/KL/HK/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 perihal Desk Penyusunan Peraturan Gubernur sebagai Tindak Lanjut Perda Tahun 2019 s.d. 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Produk Hukum Ini sebagai komitmen untuk menyelesaikan penyusunan Peraturan Gubernur sesuai batas waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. HASIL

- 1) Telah dilaksanakan proses penyusunan Rapergub terkait Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang RP3KP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 sebagai berikut :
 - Pembahasan Internal bidang Keterpaduan PKP pada hari Senin, 10 April 2023 mendasar Surat Undangan Kepala Bidang Keterpaduan PKP No : 24/BidIV/IV/2023 tertanggal 6 April 2023.
 - Pembahasan Internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang bidang-bidang dan bagian program pada hari Senin, 8 Mei 2023 mendasar Surat Undangan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah No : 04/BidIV/V/2023 tertanggal 5 Mei 2023.
- 2) Menindaklanjuti proses penyusunan tersebut diatas, maka telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur terkait Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2019 tentang RP3KP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 pada hari Rabu, 24 Mei 2023 dengan mengundang :
 - BP2P Jawa III (Jateng-DIY)
 - BPPW Jawa Tengah
 - Bappeda Provinsi Jawa Tengah
 - Dinas PU BMCK Provinsi Jawa Tengah
 - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
 - Dinas Permasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah
 - Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah
 - Biro Isda Provinsi Jawa Tengah
 - Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah
 - Sekretaris, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan, Bidang Pertanahan, dan Bidang Keterpaduan Disperakim Provinsi Jawa Tengah

- 3) Terdapat beberapa masukan yang telah diperoleh yaitu :
 - Penambahan dasar hukum dan beberapa koreksi serta masukan pada batang tubuh yang meliputi : ketentuan umum dan materi pokok yang diatur, serta beberapa koreksi dan masukan pada dokumen lampiran.
- 4) Proses administrasi pengajuan produk hukum pengaturan, terutama rancangan peraturan Gubernur adalah sebagai berikut :
 - Pengajuan produk hukum guna ditetapkan dalam program penyusunan Peraturan Gubernur Tahun 2023
- 5) Diajukan ke kantor wilayah kemenkumham Jawa Tengah guna proses harmonisasi dan sinkronisasi di Kemenkumham (jangka waktu 10 hari) berdasarkan amanah UU No. 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Diajukan fasilitasi ke Mendagri dalam rangka pembinaan produk hukum (jangka waktu 15 hari) sebagaimana amanah Permendagri No. 120/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.
 - Proses fasilitasi Mendagri dilakukan dengan salah satu syarat hasil harmonisasi dari Kanwil Kemenkumham Jateng sebagai salah satu syarat.
- 7) Saat ini Disperakim Provinsi Jawa Tengah telah terdaftar dalam daftar rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/31 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/010 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023.
- 8) Berdasarkan dari pelaksanaan rapat tersebut, Disperakim Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan revisi dan penelaahan hasil penjangkaran masukan dari OPD dan Stakeholder terkait agar mendapatkan hasil produk hukum yang lebih maksimal untuk selanjutnya akan kami proses untuk pengajuan konsep Peraturan Gubernur kepada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah (terlampir).

Demikian laporan kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Yang melaporkan,

**Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan
dan Kawasan Permukiman**



ARIF SUGENG HARYANTO, ST

NIP. 19731120 200501 1 006